



Komisi Reformasi Hukum Australia Barat

Sejarah Singkat Komisi Reformasi Hukum

Pada tahun 1960-an kebutuhan untuk terus memperhatikan isu-isu reformasi hukum sangat dirasakan di seluruh negara. Badan reformasi hukum pertama di negara bagian Australia Barat, Panitia Reformasi Hukum, dibentuk dengan keputusan Kabinet pada bulan September 1967. Setelah diskusi-diskusi dengan kelompok-kelompok kunci stakeholder, Menteri kehakiman dan Kabinet memutuskan agar Panitia tersebut terdiri dari tiga anggota paruh waktu: seorang praktisi swasta; seorang perwakilan Fakultas Hukum Universitas Australia Barat; dan seorang perwakilan dari Departemen Hukum Nasional.

Pada awalnya, Panitia Reformasi Hukum tersebut bertindak sebagai badan yang bekerja paruh waktu. Tetapi, dengan segera menjadi jelas bagi para anggota bahwa Panitia itu memerlukan status penuh waktu jika harus secara efektif memainkan peranan melanjutkan reformasi hukum. Pada tanggal 31 Oktober 1972 Panitia Reformasi Hukum tsb diberi status penuh waktu sebagai Komisi Reformasi Hukum Australia Barat berdasarkan *Akta Komisi Reformasi Hukum tahun 1972 (Australia Barat)*. (Panitia itu secara resmi diangkat sebagai suatu Komisi berdasarkan pengumuman *Akta Komisi Reformasi Hukum tahun 1972 (Australia Barat)* pada tanggal 19 Januari 1973). Komisi baru ini dibentuk sebagai badan hukum untuk bertindak secara mandiri dari badan-badan eksekutif dan legislatif pemerintah. Persyaratan bagi posisi anggota akademik Komisi diperluas untuk memungkinkan pengangkatan akademisi senior di bidang hukum dari semua universitas di Australia Barat. Pada tahun 1978 perubahan Akta tsb mengizinkan pengangkatan dua anggota penuh dan penambahan anggota menjadi lima orang.

Reformasi Hukum di Australia Barat

Komisi Reformasi Hukum Australia Barat membantu menjaga agar hukum tak ketinggalan zaman dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lewat pembuatan rekomendasi untuk reformasi bidang-bidang hukum yang diacu oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung membicarakan laporan Komisi itu di Parlemen sebagaimana yang diwajibkan oleh *Akta Komisi Reformasi Hukum tahun 1972 (Australia Barat)*.

Acuan yang diberikan kepada Komisi mungkin saja merupakan hasil dari usulan yang sebelumnya diajukan oleh Komisi kepada Jaksa Agung. Dalam hal ini Komisi dan Jaksa Agung dapat juga mempertimbangkan segala usulan untuk reformasi hukum yang diajukan oleh anggota masyarakat umum. Komisi mengharapkan menerima saran-saran untuk proyek reformasi hukum.

Komisi Reformasi Hukum tidak memberikan nasihat hukum atau melayani keluhan hukum dalam bentuk apa pun. Komisi tidak dapat mengintervensi kasus perorangan atau pun menangani hal-hal yang bersifat mewakili sistem atau profesi hukum.

Sarankanlah bidang-bidang untuk reformasi

Anggota masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan dipersilakan menghubungi Komisi Reformasi Hukum dan menyampaikan saran-saran mengenai bidang-bidang hukum yang menurut mereka perlu diubah.

Anda tidak perlu menunggu gagasan dari Komisi atau Jaksa Agung untuk reformasi hukum. Kelompok kemasyarakatan dan orang yang bekerja di bidang hukum seringkali merupakan pihak yang tepat untuk menyarankan bidang-bidang hukum mana yang memerlukan reformasi.

Kalau Anda mempunyai gagasan untuk reformasi hukum, Komisi dapat:

- Menyarankannya kepada Jaksa Agung agar hal yang disampaikan kepada Komisi tsb diteliti dan dikonsultasikan pada masyarakat; atau
- Melakukan penelitian dan membuat rekomendasi kepada pemerintah jika gagasan reformasi hukum itu menyangkut perubahan-perubahan yang kecil.

Komisi biasanya tidak akan mempertimbangkan saran-saran yang:

- terlalu kompleks bagi sumber daya yang tersedia,
- sedang ditinjau oleh Departemen Kejaksaan Agung atau oleh departemen atau kantor pemerintah yang lain,
- kemungkinan melibatkan isu-isu kebijakan yang masih dipertentangkan, atau berbagai masalah ekonomi, sosial atau hal lain yang di luar wilayah reformasi hukum, dan
- tidak sesuai; misalnya, bila masalahnya berada dalam wilayah tanggung jawab Pemerintah Pusat.

Proses Reformasi Hukum

Komisi Reformasi Hukum Australia Barat membuat rekomendasi reformasi bidang-bidang hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung. Begitu ketentuan-ketentuan sebagai acuan ditetapkan, pekerjaan selanjutnya biasanya berjalan melalui sejumlah tahapan.

- Komisi menerima acuan dari Jaksa Agung.

- Komisi melibatkan peneliti untuk melakukan penelitian, penulisan dan penyuntingan.
- Makalah tentang Isu-isu atau Makalah Diskusi diterbitkan untuk menjelaskan isu-isu kunci dan memberikan dasar konsultasi.
- Permohonan diharapkan datang dari semua kelompok dan perorangan yang berminat.
- Konsultasi dilakukan dengan anggota masyarakat, pekerja lapangan dan kantor/kelompok yang bersangkutan lainnya.
- Satu laporan diterbitkan yang berisi rekomendasi untuk perubahan hukum.
- Jaksa Agung membicarakan rekomendasi-rekomendasi tsb di parlemen.
- Parlemen memutuskan apakah akan menerapkan rekomendasi-rekomendasi itu (secara keseluruhan atau sebagian) melalui perundangan.

Membuat Permohonan

- Komisi Reformasi Hukum Australia Barat menerima permohonan mengenai topik-topik yang sedang diteliti dalam penyelidikan sekarang. Komisi mengharapkan permohonan dari berbagai lapisan masyarakat luas, dan juga dari mereka yang memiliki minat atau keahlian khusus di bidang hukum yang diteliti.
- Permohonan dapat disampaikan secara tertulis atau lewat telepon. Anda boleh membuat komentar mengenai semua aspek proyek atau memilih isu-isu yang sesuai dengan minat atau keahlian Anda. Tidak ada bentuk atau format tertentu yang harus diikuti; meskipun begitu, akan dapat membantu Komisi kalau Anda mengarahkan komentar Anda pada usulan atau pertanyaan khusus yang disebutkan dalam Makalah tentang isu-isu atau Makalah Diskusi yang bersangkutan.

Kerahasiaan

Permohonan dianggap sebagai satu sumber bukti penting bagi penyelidikan Komisi. Karena itu Komisi mungkin akan mengutip dari atau mengacu pada permohonan tsb dalam publikasinya. Bila Anda menginginkan agar permohonan Anda dirahasiakan, Anda harus memberitahu dengan jelas apakah:

- Anda mengizinkan permohonan Anda dikutip atau didiskusikan tetapi nama Anda tidak disebutkan; atau
- Anda tidak mengizinkan permohonan Anda dikutip atau didiskusikan dalam publikasi Komisi.

Hubungilah kami

Pos: Law Reform Commission of Western Australia
Level 3, BGC Centre
28 The Esplanade
Perth WA 6000
Australia

Telepon: 011+61+8 9321 4833

Faks: 011+61+8 9321 5833

E-mail: lrcwa@justice.wa.gov.au

Situs Web : www.lrc.justice.wa.gov.au

'e-Alerts' (Pemberitahuan via e-mail)

- Semua laporan dan makalah Komisi dapat di-download dari situs web Komisi segera setelah dirilis. Untuk terus mengikuti perkembangan reformasi hukum, Komisi telah mengadakan layanan gratis 'e-Alerts' (pemberitahuan via email). Layanan ini akan memberitahu para pelanggan mengenai ketersediaan acuan baru, acuan yang ada sekarang dan hubungan dengan publikasi baru dan pernyataan media yang tersedia di situs web.
- Untuk berlangganan layanan 'e-Alerts' ini, silakan Anda mengirim e-mail kepada Komisi pada alamat Ircwa@justice.wa.gov.au dengan subyek e-mail 'eAlerts' serta memberikan nama dan detail alamat Anda.